



DPRD Kalbar Soroti Angka SiLPA 2021

PONTIANAK, SP - DPRD Kalimantan Barat akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2021.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan meski secara umum capaian yang disampaikan dalam LKPj dinilai baik, namun ia menyoroti tingginya SiLPA tahun 2021.

"SiLPA ini yang kita soroti, semoga tahun mendatang tidak ada lagi SiLPA itu. Adanya SiLPA ini kan karena kehati-hatian kita menghadapi Covid-19, dan ternyata tidak digunakan karena Covid-19 menurun, namun dari pemerintah sudah menyiapkan anggaran

untuk penanganannya," katanya, belum lama ini.

Selain itu, yang menjadi perhatian adalah terkait anggaran infrastruktur yang tidak terserap maksimal. Hal ini dikarenakan pelaksanaan lelang proyek yang masih dilakukan pada akhir tahun.

"Tender kita ini banyak yang dilakukan di ujung-ujung (tahun). Kita harap tahun ini tidak seperti ini lagi. Tender itu sebaiknya dilakukan awal tahun," pungkas Prabasa.

Sebelumnya Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur

Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2021, Kamis, 31 Maret 2022 mengatakan dari sisi keuangan memang terjadi SiLPA dengan akumulatif persentasenya mencapai 20 persen lebih.

"Angka pastinya untuk SiLPA APBD 2021 diperkirakan sekitar Rp313 miliar lebih. Sekitar itu angkanya," ucap dia.

Menurut dia persoalan munculnya SiLPA 2021, pertama disebabkan anggaran yang dipersiapkan untuk pandemi Covid-19 ternyata tahun 2021 tidak terserap semua. Kemudian ada porsi sisa dana lain yang menjadikan kenaikan pada porsi pajak pendapatan.

"Memang 2021, kami (Pemprov Kalbar) fokus

pada pandemi Covid-19. Penyiapan bahan-bahan dan instrumen lain mengacu kepada kebijakan penanganan dan pengentasan Covid-19," ujar dia.

Program lain penyebab terjadinya SiLPA yakni banyaknya program DAK (Dana Alokasi Khusus), banyak tidak terlaksana. Paling banyak berada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Lingkungan Hidup Hidup, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sementara untuk OPD di PUPR rata-rata terlaksana semuanya.

"Alasan banyak program tidak terlaksana waktunya terlalu mepet untuk dilakukan. Kalau dipaksakan bisa sengkabut nanti. Bisa repot semua," katanya. (jee)